

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017

Katalog BPS : 9302020.32
Nomor Publikasi : 32550.1802
Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 108 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Desain Cover:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat statistik

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017

Anggota Tim Penyusun:

Penanggungjawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ.

Penanggungjawab Teknis : Noneng Komara Nengsih, SE, MAP

Penulis : Marisa Intan, SP, MT, MPP
Yuni Anggorowati, S.ST

Pengolah data : Marisa Intan, SP, MT, MPP
Yuni Anggorowati, S.ST

Editor : Ir. Ninik Anisah, M.Sc
Nani Komalasari, SE
Vira Wahyuningrum, SST, M.Stat

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Juli 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	11
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5. Perubahan Inventori	25
2.6. Ekspor Impor	30
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB	
PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017	33
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran	35
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	42
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	52
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	54
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	59
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	63
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	65
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	68

	Halaman
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2015	73
4.1 PDRB (Nominal)	75
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	77
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	78
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	80
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	81
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	82
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	83
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	85
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	87
4.10 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	88
 PENUTUP	 91
 LAMPIRAN	 97

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	37
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	38
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	40
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2011 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	42
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	43
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	45
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	48
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	49
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	51
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRP Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	53
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	55
Tabel 12.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	58
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	62

Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	65
Tabel 15.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	66
Tabel 16.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	69
Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	76
Tabel 18.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2017	77
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2017	79
Tabel 20.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	80
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013 – 2017	82
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	83
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	84
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	86
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	88
Tabel 26.	Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017	90

BAB I
PENDAHULUAN

<https://jabar.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. **Menurut Pendekatan Produksi,**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan

Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai

PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri serta luar wilayah.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://jabar.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, adalah:

- makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder.

Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i **Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii **Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam

organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas,

belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas

wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*)

menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).

- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di

dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan

adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM

dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii **Konsep dan definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii **Cakupan**

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut dengan cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia

(NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA
BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013 - 2017

<https://jabar.bps.go.id>

Salah satu kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 adalah diarahkan untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal. Oleh karena itu diperlukan dukungan data yang menyajikan potensi perekonomian wilayah secara agregat dan komprehensif. Gambaran perkembangan perekonomian wilayah disajikan dalam pembahasan berikut.

Perekonomian Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2016 terjadi perbaikan kinerja ekonomi setelah didera krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2013. Tahun 2016 kinerja ekonomi mengalami laju pertumbuhan yang semakin cepat dengan LPE mencapai 5,67 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa secara makro perekonomian Jawa Barat mengalami perbaikan. Namun pada tahun 2017 perekonomian kembali melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,29 persen. Pola yang sama juga terjadi pada perekonomian nasional, namun LPE Jawa Barat masih di atas nasional. Sehingga secara rata-rata nasional, perekonomian Jawa Barat masih tumbuh mantap.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Tinjauan dari sisi supply dijabarkan pada PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan dari sisi demand dijabarkan oleh PDRB menurut pengeluaran. Keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan Pemerintah Daerah. PDRB menurut lapangan usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan

jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan. Lebih spesifik PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh Rumahtangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) serta Pemerintah. Konsumsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB menurut pengeluaran. Investasi dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu mulai dari Rumahtangga, LNPRT, Pemerintah, Korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD. Juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara. Konsumsi akhir oleh rumahtangga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan tarikan permintaan dalam perekonomian. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan Perubahan Inventori, menggambarkan bagaimana kekuatan perekonomian Jawa Barat berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik juga diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor. Nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Nilai PDRB Jawa Barat Indonesia (adh Berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro

tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar nasional dan internasional.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	812,568.32	881.109,40	983.765,23	1.083.451,79	1.174.540,81
2. Konsumsi LNPRT	8,518.79	9.189,59	8.908,65	9.564,96	10.545,72
3. Konsumsi Pemerintah	73,717.54	81.202,69	98.292,76	105.727,59	108.388,22
4. PMTB	301,400.00	346.009,58	382.975,60	412.295,91	449.337,05
5. Perubahan Inventori	58,549.69	64.617,77	59.421,46	68.495,05	68.968,72
6. Ekspor	440,292.66	504.250,14	560.913,96	610.723,54	712.663,11
7. Dikurangi Impor	436,057.69	500.554,09	569.302,83	637.501,02	738.351,25
Total PDRB	1,258,989.33	1.385.825,08	1.524.974,83	1.652.757,82	1.786.092,38

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh

Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut berarti terjadi tarikan yang cukup kuat dari sisi permintaan terhadap perekonomian secara agregat.

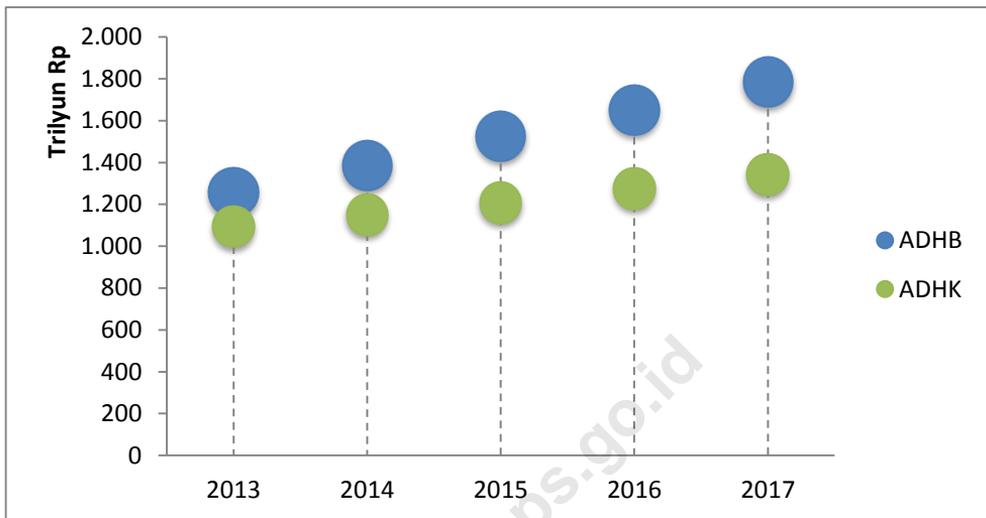
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 - 2017**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	695.522,78	723.018,27	759.652,86	802.157,91	839.292,73
2. Konsumsi LNPRT	7.466,06	7.726,70	7.098,78	7.487,44	7.844,28
3. Konsumsi Pemerintah	58.868,33	61.013,47	65.955,83	68.434,13	68.593,58
4. PMTB	268.318,28	287.389,55	299.342,64	313.083,70	332.750,61
5. Perubahan Inventori	52.493,82	51.367,73	42.887,06	44.598,38	42.304,73
6. Ekspor	379.154,22	400.530,84	423.152,22	435.563,51	485.841,24
7. Dikurangi Impor	368.279,95	381.830,50	391.005,98	395.959,46	433.673,79
Total PDRB	1.093.543,55	1.149.216,06	1.207.232,34	1.275.527,64	1.342.953,38

Dari Grafik 1 , nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Sehingga selisih nilai antara adh Berlaku dengan adh Konstan merupakan nilai perubahan harga.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan tabel 3 berikut terlihat bahwa selama periode 2013 – 2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, dan mencapai peranan tertinggi di tahun 2017 mencapai 39,90 persen, ini berarti produk Jawa Barat cukup banyak bersaing di pasar internasional maupun pasar nasional. Namun demikian peranan impor masih mempunyai peran yang relatif besar di tahun 2017 mencapai 41,34 persen sedikit di atas peranan ekspor. Hal ini memberikan gambaran bahwa permintaan domestik masih belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh produk domestik sehingga masih diperlukan impor baik luar negeri maupun luar provinsi.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 – 2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,54	63,58	64,51	65,55	65,76
2. Konsumsi LNPRT	0,68	0,66	0,58	0,58	0,59
3. Konsumsi Pemerintah	5,86	5,86	6,45	6,40	6,07
4. PMTB	23,94	24,97	25,11	24,95	25,16
5. Perubahan Inventori	4,65	4,66	3,90	4,14	3,86
6. Ekspor	34,97	36,39	36,78	36,95	39,90
7. Dikurangi Impor	34,64	36,12	37,33	38,57	41,34
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Di sisi lain, pengeluaran untuk PMTB juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 20 persen. Selama periode 2013 - 2017 peranan PMTB tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 25,16 persen dan terendah di tahun 2013 yaitu sebesar 23,94 persen. Adapun di tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 24,95 persen. Hal tersebut menggambarkan adanya titik balik peningkatan aset tetap secara agregat dalam perekonomian Jawa Barat pada tahun 2017. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah dorongan dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak langsung menciptakan pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat pada tahun yang sama. Namun dampaknya akan dapat dinikmati pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan perekonomian Jawa Barat semakin menguat. Disamping itu pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi (profit) tapi juga memberikan manfaat (benefit) bagi pembangunan secara menyeluruh. Sehingga dalam analisa lebih lanjut pada beberapa tahun terakhir investasi di Jawa Barat terkesan kurang

efisien, namun di masa yang akan datang dapat terlihat profit dan benefit dari investasi di masa sekarang bagi perekonomian masa mendatang.

Komponen konsumsi akhir pemerintah peranannya berada pada rentang sekitar 6 persen, pada tahun 2017 sebesar 6,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Keterbatasan tersebut disebabkan karena belanja pemerintah difokuskan kepada belanja modal terutama yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, perdagangan internasional dan antar provinsi yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2014, posisi “surplus”, dan pada tahun 2015-2017 nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”. Perbandingan porsi nilai ekspor dan impor yang hampir seimbang menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap perekonomian luar wilayah, baik luar negeri maupun luar provinsi.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2013 s.d 2017 secara rata-rata mencapai 5,48 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,33 persen (2013); 5,09 persen (2014); 5,05 persen (2015); 5,66 persen (2016) dan 5,29 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,33 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (5,05 persen). Kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang melambat mengindikasikan melemahnya perekonomian Jawa Barat meskipun bukan merupakan penurunan pertumbuhan.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 – 2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,37	3,95	5,07	5,60	4,63
2. Konsumsi LNPRT	14,34	3,49	(8,13)	5,48	4,77
3. Konsumsi Pemerintah	0,89	3,64	8,10	3,76	0,23
4. PMTB	(1,02)	7,11	4,16	4,59	6,28
5. Perubahan Inventori	(22,46)	(2,15)	(16,51)	3,99	(5,14)
6. Ekspor	(6,29)	5,64	5,65	2,93	11,54
7. Impor	(17,47)	3,68	2,40	1,27	9,52
Total PDRB	6,33	5,09	5,05	5,66	5,29

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Sedangkan perubahan indeks implisit secara total merupakan perubahan secara umum atau menurut berbagai kegiatan ekonomi.

Perubahan indeks implisit pada konsumsi rumahtangga berbeda dengan besaran Indeks Harga Konsumen (IHK). Perbedaan ini karena cakupan komoditas di wilayah dimana indeks implisit mencakup semua komoditas yang dikonsumsi oleh rumahtangga di perkotaan maupun pedesaan, sedangkan IHK hanya mencakup sebagian komoditas dan rumahtangga di wilayah perkotaan saja.

¹ Indeks perkembangan

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	<i>Persen</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	116,83	121,87	129,50	135,07	139,94
2. Konsumsi LNPR	128,08	136,29	144,04	155,68	160,41
3. Konsumsi Pemerintah	105,96	106,74	109,05	112,25	115,53
4. PMTB	114,09	117,65	127,00	128,81	137,02
5. Ekspor	108,12	110,39	116,10	119,73	124,16
6. Impor	111,71	115,02	123,20	124,85	128,98
Total PDRB	106,28	112,23	116,64	116,67	119,46

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di wilayah provinsi Jawa Barat adalah untuk konsumsi akhir rumahtangga. Oleh karena itu analisis mengenai pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga dalam ekonomi makro merupakan hal yang sangat penting. Konsumsi rumahtangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumahtangga maka akan semakin besar pula nilai konsumsinya. Rumahtangga sebagai pemilik faktor produksi memperoleh pendapatannya dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya, sehingga saat kondisi perekonomian meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Hal inilah yang mempengaruhi besaran fluktuasi kegiatan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Permintaan akhir secara keseluruhan juga dapat memberikan dampak tarikan terhadap aktivitas ekonomi, tingginya permintaan terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh peningkatan produksi. Data berikut menunjukkan di mana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data pada Table 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan kelas menengah (*middle class*) menyebabkan terjadinya perbaikan serta merubah perilaku dan kebiasaan konsumsi penduduk secara agregat. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Demikian halnya dukungan dari lembaga keuangan dengan berbagai fasilitas dan penawaran yang semakin mempermudah rumahtangga dalam hal pembiayaan konsumsi. Semakin majunya teknologi informatika dan perkembangan media sosial yang tidak terbelah juga mempengaruhi standar konsumsi dan gaya hidup masyarakat.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d 2017 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 65,76 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 63,58 persen.

Rata-rata konsumsi per rumahtangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumahtangganya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb) selama periode 2013 s.d. 2017. Pengeluaran ini terus meningkat dari 67.218,71 ribu rupiah (2013) menjadi 71.821,90 ribu rupiah (2014); 79.237,77 ribu rupiah (2015); 86.057,97 ribu rupiah (2016) dan pada tahun 2017 sebesar 92.040,21 ribu rupiah. Meningkatnya

nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi non makanan.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	812.568,32	881.109,40	983.765,23	1.083.451,79	1.174.540,81
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	695.522,78	723.018,27	759.652,86	802.157,91	839.292,73
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	64,54	63,58	64,51	65,55	65,76
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	67.218,71	71.821,90	79.237,77	86.057,97	92.040,21
b. ADHK 2010	57.536,27	58.935,41	61.186,55	63.714,96	65.769,26
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	17.921,35	19.142,23	21.061,31	22.867,57	24.450,45
b. ADHK 2010	15.339,89	15.707,68	16.263,31	16.930,52	17.471,58
<u>Pertumbuhan[1]</u>					
a. Total konsumsi RT	4,37	3,95	5,07	5,60	4,63
b. Per-RT	2,80	2,43	3,82	4,13	3,22
c. Perkapita	2,77	2,40	3,54	4,10	3,20
Jumlah RT (<i>unit</i>)	12.088.424	12.267.977	12.415.357	12.589.790	12.761.171
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	45.340,80	46.029,60	46.709,60	47.379,40	48.037,60

Kenaikan konsumsi per rumah tangga ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah anggota rumahtangga, atau peningkatan kualitas komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut. Peningkatan rata-rata konsumsi per rumahtangga sangat berkorelasi dengan peningkatan daya beli

masyarakat. Hal ini dapat diamati dari laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga yang selalu tumbuh tiap tahun dengan kisaran 3 persen dan pertumbuhan terendah di tahun 2014 yaitu sebesar 2,43 persen dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,13 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata perkapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 2 s.d 4 persen, dan peningkatan rata-rata untuk konsumsi secara nilai berkisar antara 367,79 – 667,21 ribu rupiah. Pergerakan nilai rata-rata konsumsi perkapita ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 4,37 persen tahun 2013, kemudian melambat pada tahun 2014 menjadi 3,95 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 konsumsi rumah tangga meningkat yaitu sebesar 5,07 persen dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,60 persen. Pada tahun 2017 konsumsi rumahtangga meningkat sebesar 4,63 persen, melambta dari dua tahun sebelumnya. Konsumsi rumahtangga perkapita di tahun 2013 sebesar 2,77 persen, pada tahun berikutnya 2014 melambat menjadi 2,40 persen, selanjutnya ada tahun 2015 meningkat sebesar 3,54 persen dan pada tahun 2016 meningkat signifikan dan yang tertinggi sepanjang periode yaitu 4,10 persen. Konsumsi rumahtangga perkapita kembali tumbuh melambat pada tahun 2017 dengan meningkat sebesar 3,20 persen. Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumahtangga tidak serta merta karena daya beli masyarakat yang menurun, tetapi bisa juga karena perubahan

perilaku konsumsi masyarakat yang berubah, menjadi perilaku investasi atau menabung. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “ riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 (dua) persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data agregat PDRB ini.

Tabel 7 menggambarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Jawa Barat, didominasi oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Namun demikian cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 37,64 persen di tahun 2013 menjadi 38,96 persen (2014) ; 39,40 persen (2015); 41,33 persen (2016) serta 41,60 persen (2017). Adapun sebaliknya proporsi pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 62,36 persen (2013); 61,04 persen (2014); 60,60 persen (2015); menjadi 58,67 pesen pada tahun 2016 serta pada tahun 2017 sebesar 58,40 persen. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012 – 2017²**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	37,64	38,96	39,40	41,33	41,60
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,31	4,11	4,05	3,97	3,91
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,24	11,86	12,11	11,74	11,73
d. Kesehatan & Pendidikan	6,02	5,95	5,78	5,59	5,60
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	27,35	26,82	26,79	26,11	25,96
f. Hotel & Restoran	6,68	6,49	6,17	5,88	5,84
g. Lainnya	5,76	5,81	5,71	5,38	5,35
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Peningkatan peranan konsumsi makanan, minuman dan tembakau selama lima tahun terakhir menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Jawa Barat memiliki kecenderungan kembali kepada prioritas pemenuhan kebutuhan primer. Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung semakin melambat maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, hal tersebut menyebabkan rumah tangga melakukan beberapa pilihan dalam melakukan konsumsi. Seiring dengan perlambatan tingkat pendapatan maka pola konsumsi cenderung kembali kepada pemenuhan kebutuhan primer. Proporsi konsumsi di atas, menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Seiring dengan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Dalam konsep *System of National Account 2008* (SNA 2008) komoditi makanan jadi produk penyedia makanan dan minuman (restoran) termasuk dalam konsumsi non makanan.

Provinsi Jawa Barat memiliki pola konsumsi masyarakat yang cenderung ke arah perkotaan, hal tersebut disebabkan oleh dominasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Berdasarkan data proyeksi penduduk, pada tahun 2015 persentase penduduk Jawa Barat yang tinggal di perkotaan mencapai 72,9 persen, dan sisanya 27,1 persen tinggal di daerah pedesaan. Dan pada tahun 2020 penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 78,7 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,32	5,48	6,83	6,92	5,89
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,95	2,64	7,59	5,00	3,72
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	3,77	1,84	5,66	5,27	1,84
d. Kesehatan & Pendidikan	7,23	4,97	3,00	3,27	4,88
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,10	3,28	4,14	5,89	4,35
f. Hotel & Restoran	3,37	(0,26)	2,17	4,95	5,16
g. Lainnya	2,71	8,01	1,83	0,77	3,96

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2015 yang sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2013-2017 pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok cenderung meningkat yaitu 4,32 persen (2013); 5,48 persen (2014); 6,83 persen (2015); 6,92 persen (2016) dan melambat 5,89 persen (2017). Pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki selama periode 2013-2017 cenderung menurun, pada tahun 2013 sebesar 7,95 persen dan melambat sampai dengan tahun 2017 menjadi 3,72 persen. Pola melambat juga terjadi pada komoditi perumahan, perkakas perlengkapan rumahtangga; komoditi kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya tumbuh stabil, sedangkan komoditi hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat dan cepat.

Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Kecenderungan peningkatan konsumsi komoditi hotel dan restoran sejalan dengan fenomena pariwisata yang semakin marak. Kekuatan sosial media dalam menyebarkan informasi trend lokasi wisata mempengaruhi berubahnya pola konsumsi masyarakat ke arah kebutuhan “leisure” daripada kebutuhan fisik. Hal tersebut tergambar dari pola pertumbuhan konsumsi rumahtangga yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik cenderung melambat sedangkan kebutuhan yang bersifat “leisure” cenderung meningkat.

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan tersebut mencakup perubahan harga pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2013, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 8,87 persen (2013); 6,41 persen (2014); 5,68 persen (2015); 8,08 persen (2016) dan 3,04 persen (2017). Inflasi produk bahan makanan, minuman dan tembakau pada tahun 2017 melambat signifikan, ini berarti bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan inflasi komoditi volatile yaitu harga beras, daging dan cabai yang termasuk dalam kelompok ini. Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki cenderung stabil dan terkendali yaitu sebesar 1,66 persen (2013); 0,74 persen (2014); 2,16 persen (2015); 2,94 persen (2016) dan 2,92 persen (2017).

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017³

		(Persen)				
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,87	6,41	5,68	8,08	3,04	
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,66	0,74	2,16	2,94	2,92	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,69	3,12	7,94	1,42	6,38	
d. Kesehatan & Pendidikan	2,71	2,11	5,17	3,13	3,70	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,34	2,97	7,11	1,33	3,31	
f. Hotel & Restoran	2,87	5,59	3,94	0,02	2,39	
g. Lainnya	3,59	1,34	7,65	3,06	3,63	

Harga produk pakaian dan alas kaki cenderung stabil, karena ketersediaan suplai tidak bersifat musiman, juga karena sifat komoditinya yang tahan lama.

³ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Yang lebih mempengaruhi harga komoditi ini adalah adanya peningkatan harga produksi karena kenaikan bahan baku atau bahan bakar. Harga kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah cenderung fluktuatif, pada tahun 2013, 2015 dan 2017 terjadi peningkatan harga. Hal ini seiring dengan peningkatan harga tarif dasar listrik dan harga bahan bakar. Inflasi kelompok komoditi kesehatan dan pendidikan pada tahun 2015 meningkat sampai sekitar 5 persen, di tahun-tahun lainnya hanya pada kisaran 2-3 persen. Peningkatan tersebut pada harga atau biaya jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil survei "Medical Trends Around the World 2016" yang dikeluarkan Mercer Marsh Benefits yang menyebutkan bahwa biaya pengobatan di Indonesia pada 2015 naik sebesar 12,7 persen, mengalahkan Singapura dan China.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Nilai konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) selalu meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Institusi ini merupakan lembaga non pemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah *civil society*. Selama periode 2013 - 2017 peranan konsumsi akhir LNPRT kurang dari 1 (satu) persen yaitu 0,68 pada tahun 2013 kemudian menurun

pada tahun 2014 menjadi 0,66 persen dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 0,58 persen, dan pada tahun 2016 peranannya tetap. Pada tahun 2017 peranan konsumsi LNPRT sedikit meningkat.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	8.518,79	9.189,59	8.908,65	9.564,96	10.545,72
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	7.466,06	7.726,70	7.098,78	7.487,44	7.844,28
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,68	0,66	0,58	0,58	0,59

Pada tahun 2013 dan 2014 konsumsi akhir LNPRT lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 maupun 2016, hal ini disebabkan adanya perhelatan besar pemilihan gubernur pada tahun 2013 dan pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2014. Pada akhir tahun 2017 persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018, Gubernur dan bupati/walikota mulai dilakukan, berupa musyawarah-musyawarah daerah (Musda), pemilihan pasangan calon, kesepakatan antar partai pendukung dalam bentuk rapat dan pertemuan telah banyak dilakukan. Sehingga pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi partai politik telah dilakukan.

Peran LNPRT selain saat Pilkada juga saat terjadinya bencana alam. Pada tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat telah terjadi bencana sebanyak 1500 kejadian. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 tercatat di Jawa Barat terjadi 532 kejadian, dan meningkat di tahun 2016 tercatat 1.133 kejadian bencana. Pada setiap kejadian bencana alam, LNPRT berperan dalam pertolongan pertama dan penanggulangan baik

korban maupun dampak lingkungan, sehingga pengeluarannya akan meningkat signifikan.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai output untuk komoditi non pasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai output pemerintah non pasar, ada juga output pemerintah dengan harga pasar. Output pasar tersebut diantaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Jawa Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 73.717,54 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 108.388,22 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan

pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	73.717,54	81.202,69	98.292,76	105.727,59	108.388,22
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	58.868,33	61.013,47	65.955,83	68.434,13	68.593,58
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	5,86	5,86	6,45	6,40	6,07
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
ADHB	1.625,85	1.764,14	2.104,34	2.231,51	2.256,32
ADHK 2010	1.298,35	1.325,53	1.412,04	1.444,39	1.427,91
Konsumsi Pemerintah per- pegawai (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	170.712,41	182.277,66	219.410,84	246.600,13	252.805,82
b. ADHK 2010	136.325,14	136.958,42	147.227,77	159.616,47	159.988,38
Pertumbuhan ⁴					
a. Total konsumsi pemerintah	0,89	3,64	8,10	3,76	0,23
b. Kons pemerintah perkapita	(0,66)	2,09	6,53	2,29	(1,14)
c. Kons pemerintah perpegawai	4,93	0,46	7,50	8,41	0,23
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	45.340,80	46.029,60	46.709,60	47.379,40	48.037,60
Jumlah pegawai (<i>org</i>) ⁵	431.823	445.489	447.985	428.741	428.741

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, sampai dengan 2012 peranannya pada kisaran 6 persen, namun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan peranan menjadi 5,86 persen dan kemudian meningkat kembali menjadi 6,45 persen pada tahun 2015 dan kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 6,07 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2017

⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁵ Tidak termasuk polisi dan militer

pemerintah mencanangkan sebagai tahun infrastruktur, oleh karena itu belanja pemerintah difokuskan pada penggenjotan target pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Oleh karena itu pemerintah melakukan penghematan besar-besaran terutama untuk yang sifatnya belanja konsumsi.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah provinsi kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per-kapita dimana selama periode 2013 - 2017 terjadi peningkatan pada rata-rata konsumsi per-kapita. Konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku pada tahun 2013 sebesar 1.625,85 ribu rupiah, dan pada tahun 2017 meningkat mencapai 2.256,32 ribu rupiah (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 dan 2017 (lihat tabel 11). Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya pada tahun 2013 menurun sebesar 0,66 persen, kemudian meningkat 2,09 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 meningkat 6,53 persen serta melambat menjadi 2,29 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah perkapita menurun 1,14 persen. Penurunan konsumsi pemerintah perkapita merupakan sinyalemen yang baik bahwa pemerintah telah melakukan penghematan belanja konsumsi, tanpa menurunkan kualitas pelayanan pemerintah.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 170.712,41 ribu rupiah, kemudian meningkat pada

tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 8,41 persen. Selama periode tahun 2013 s.d 2017 jumlah pegawai pemerintah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah pemerintah berjumlah 431.823 orang; menurun menjadi 428.741 orang di tahun 2016. Penurunan terus terjadi terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan PNS. Dalam kurun waktu tersebut, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 9.082 orang atau turun sekitar 0,7 persen sejak tahun 2013.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” tersebut menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, secara rata-rata 55 persen dari total pengeluaran pemerintah. Konsumsi kolektif adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik yang bersifat kolektif, atau yang bisa dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Akta Tanah, perijinan dan layanan administrasi lainnya. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12), namun secara proporsi cenderung mengalami penurunan.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	41.628,11	46.353,99	54.735,87	57.519,43	56.690,80
(%)	56,47	57,08	55,69	54,40	52,30
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	32.089,44	34.848,70	43.556,89	48.208,15	51.697,42
(%)	43,53	42,92	44,31	45,60	47,70
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	73.717,54	81.202,69	98.292,76	105.727,59	108.388,22
(%)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
Pertumbuhan riil (ADHK2011) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	4,43	2,88	6,31	1,47	(3,81)
b. Konsumsi Individu	(3,39)	4,64	10,40	6,59	5,00
Total Konsumsi	0,89	3,64	8,10	3,76	0,23
Pertumbuhan indeks harga Implisit (%)					
Implisit					
a. Konsumsi Kolektif	5,90	8,23	11,08	3,56	2,47
b. Konsumsi Individu	5,93	3,78	13,21	3,84	2,13
Total Konsumsi	5,90	6,28	11,98	3,67	2,28

Sedangkan konsumsi individu adalah konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani publik dengan target tertentu. Misalnya biaya pendidikan dasar hanya untuk penduduk di usia sekolah dasar, biaya kesehatan untuk melayani masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Dalam konsumsi ini termasuk juga biaya untuk perlindungan sosial. Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12), demikian halnya peranannya terhadap total konsumsi pemerintah. Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2013-2017 terus meningkat yaitu dari 43,53 persen menjadi 47,7 persen pada tahun 2017. Hal

tersebut menggambarkan keberpihakan pemerintah dalam melayani masyarakat dan berupaya untuk lebih tepat sasaran.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah karena keberadaannya dapat meningkatkan kapasitas produksi. Suatu pengeluaran digolongkan kedalam investasi jika ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produksi. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu program dalam pengembangan dunia usaha dan pariwisata termasuk kedalam Prioritas Nasional 2018.

Jenis investasi fisik secara jangka panjang lebih dapat menggambarkan kekayaan suatu wilayah dibandingkan dengan investasi portofolio dengan karakteristik jangka pendek. Secara konteks makro, investasi merupakan investasi fisik terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Inventori. PMTB berkaitan dengan keberadaan asset tetap yang dimiliki oleh suatu unit produksi. Secara garis besar asset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi, mesin, kendaraan, ternak, tumbuhan dan barang modal lainnya.

Pembangunan infrastruktur berfungsi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat mendukung perekonomian wilayah sekitar. Komitmen Pemerintah Daerah Jawa Barat terhadap pembangunan infrastruktur tertuang dalam *Common Goals* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu Infrastruktur, Wilayah, Energi dan Air Baku.

Lebih jauh, untuk mendukung visi pembangunan Jawa Barat tertuang dalam Misi Keempat, mewujudkan Jawa Barat Yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, selanjutnya

dijabarkan kedalam tujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat selama tahun 2017 diantaranya tahap penyelesaian Bandar Udara Internasional Kertajati atau dikenal dengan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka dimana pembangunannya telah berlangsung pada periode sebelumnya. Kawasan dengan konsep Aerotropolis ini dibangun didaerah persawahan dan pedesaan seluas 5.000 Ha dengan 1.800 Ha area bandara dan 3.200 HA. Bandara Kertajati ini lokasinya di utara jalan Tol Cipali dan barat berbatasan dengansungai Cimanuk Kabupaten Majalengka. Aerotropolis merupakan suatu konsep pengembangan kota bandara atau "Airport City". Menurut John. D. Kasarda (2011) dari University of North Carolina, pengembangan bandara internasional dapat menjadi pemicu pengembangan bisnis serta kawasan urban di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur lainnya di Jawa Barat adalah jalan yaitu jalan tol yang menghubungkan Bekasi - Cawang - Kampung Melayu, selain itu Pembangunan jalur kereta api jalur Tanjungrasa - Cibungur sepanjang 12 kilometer.

Perkembangan aktivitas investasi Jawa Barat selama kurun lima tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan tendensi yang meningkat. Hal ini tercermin dari nilai PMTB adh Berlaku setiap periode terus menerus mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2013 nilai PMTB masih sebesar 301,400 miliar rupiah kemudian pada tahun 2017 telah mencapai 449,337 miliar rupiah atau selama periode tersebut mengalami penambahan nilai sebesar 147.937 miliar rupiah.

Sejalan dengan kinerjanya yang tercermin dalam nilai PMTB adh Konstan 2010 yang mengalami peningkatan setiap periode, tercatat pada tahun 2017 mencapai 332.751 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB adh Konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat selama

lima tahun terakhir karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

Aktivitas investasi dalam perekonomian Jawa Barat memiliki peranan signifikan, hal ini dapat dicermati dari peranan komponen PMTB dalam PDRB Jawa Barat. Komponen ini memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga dengan rata-rata peranan selama lima tahun terakhir (2013-2017) sebesar 24,82 persen terhadap total PDRB. Kontribusi tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 25,16 persen dan terendah di tahun 2013 sebesar 23,94 persen.

Komponen PMTB dalam publikasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis asset fisik berupa konstruksi mendominasi dalam perekonomian Jawa Barat. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB Bangunan sebesar tiga perempat bagian dari total PMTB, dengan rata-rata kontribusi selama 2013-2017 sebesar 75,61 persen. Peranan PMTB Bangunan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 77,43 persen dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 74,62 persen.

Sementara komponen PMTB Non Bangunan terdiri dari : Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Peranan PMTB Non Bangunan rata-rata selama 2013-2017 sebesar 24,39 persen. Peranan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 22,57 persen dan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 25,38 persen, meskipun demikian proporsi PMTB Non Bangunan selama 2014-2017 selalu di atas 24,50 persen.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	301.400,00	346.009,58	382.975,60	412.295,91	449.337,05
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	268.318,28	287.389,55	299.342,64	313.083,70	332.750,61
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	23,94	24,97	25,11	24,95	25,16
Struktur PMTB ^[1]					
a. Bangunan (Miliar Rp)	233.363	260.271	288.868	307.656	338.491
(%)	77,43	75,22	75,43	74,62	75,33
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	68.037	85.738	94.108	104.640	110.847
(%)	22,57	24,78	24,57	25,38	24,67
Total PMTB (Miliar Rp)	301.400	346.010	382.976	412.296	449.337
(%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan^[2] (%)					
a. Bangunan	10,81	4,00	5,13	5,02	7,24
b. Non Bangunan	-27,14	17,56	1,28	3,25	3,27
Total PMTB	-1,02	7,11	4,16	4,59	6,28

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Selama periode 2014-2017 secara riil komponen PMTB mengalami pertumbuhan positif, sementara pada tahun 2013 komponen ini mengalami kinerja negative dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2013-2017 sebesar 4,22 persen. Kinerja PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,11 persen sementara tahun 2013 pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 1,02 persen. Tahun 2017 kinerja PMTB mengalami peningkatan signifikan sebesar 6,28 persen terhadap tahun 2016, setelah pada dua periode sebelumnya (2015-2016) hanya tumbuh pada kisaran 4 (empat) persen. Kinerja PMTB Bangunan selama 2013-2017 menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,44 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 10,81 persen dan setahun kemudian mengalami pertumbuhan terendah sebesar 4,00 persen. Sementara PMTB Non Bangunan mengalami pertumbuhan

tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 17,56 persen setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 27,14 persen. Kinerja pada tiga tahun terakhir (2015-2017) secara bertahap mengalami peningkatan meski masih di bawah 4 (empat) persen dengan pertumbuhan sebesar 3,27 persen pada tahun 2017.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Perubahan inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi dalam suatu wilayah selain Pembentukan Modal Tetap Bruto. Perubahan inventori menggambarkan porsi investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi dan bahan baku maupun bahan penolong pada satu periode. Inventori merupakan berbagai barang yang dikuasai oleh produsen untuk diolah lebih lanjut menjadi bentuk lain yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai guna yang lebih tinggi.

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) secara nominal perubahan inventori memiliki kecenderungan yang meningkat kecuali pada tahun 2015 mengalami pengurangan dengan tingkat perubahan nilai ADHB sebesar 8,04

persen. Sejalan dengan kinerja komponen perubahan inventori secara riil mengalami kontraksi pada tahun 2015 sebesar 16,51 persen. Besaran perubahan inventori pada periode 2013-2017 menunjukkan angka positif yang menunjukkan bahwa terjadi penambahan dalam persediaan barang pada kategori yang tergolong *tradable* .

Peranan komponen perubahan inventori terhadap perekonomian Jawa Barat secara rata-rata pada tahun 2013-2017 sebesar 4,24 persen. Pada tahun 2014 peranan komponen ini merupakan yang terbesar yaitu 4,66 persen kemudian dalam tiga tahun terakhir belum dapat meningkat pada posisi diatas 4,50 persen.

Fenomena perkembangan perubahan inventori di Jawa Barat memiliki keterkaitan dengan kinerja nilai impor bahan baku karena bahan baku untuk produksi di Jawa Barat mayoritas dipenuhi dari aktivitas impor dengan peranan sebesar 81,20 persen pada tahun 2017. Proporsi impor bahan baku selama empat tahun terakhir (2014-2017) memiliki tendensi yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 saat terjadi penurunan nilai perubahan inventori sebaliknya terjadi pertumbuhan positif pada impor bahan baku. Secara makna nilai perubahan inventori menurun berarti bahan baku terpakai untuk aktivitas produksi sehingga diperlukan tambahan bahan baku untuk memenuhinya, sehingga dilakukan aktivitas impor bahan baku.

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Milyar Rp)	58.549,69	64.617,77	59.421,46	68.495,05	68.968,72
b. ADHK (Milyar Rp)	52.493,82	51.367,73	42.887,06	44.598,38	42.304,73
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ^[1]	4,65	4,66	3,90	4,14	3,86

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas ekspor barang dan jasa suatu wilayah mencakup transaksi perdagangan dari dalam wilayah tempat aktivitas ekonomi tersebut berlangsung ke luar wilayah, baik antar daerah maupun luar negeri. Aktivitas ekspor secara makro ekonomi berlaku sebagai penambah bagi perekonomian, akan tetapi untuk mengamati perkembangan komponen ini maka harus dikurangi dengan aktivitas impor yang dilakukan wilayah tersebut. Neraca perdagangan suatu wilayah dapat diamati dengan mengurangi nominal ekspor dengan impornya sehingga hasilnya akan terjadi surplus atau defisit.

Transaksi ekspor dalam perekonomian makro menurut struktur permintaan menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari non

residen. Permintaan barang dan jasa terhadap produk domestik dari non residen dimana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) komponen Ekspor Barang dan Jasa menunjukkan peningkatan nilai setiap periode secara nominal dan riil. Hal ini menjadi indikasi positif bagi perekonomian Jawa Barat karena komponen ekspor merupakan faktor penambah bagi perekonomian wilayah, devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan, selain itu dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif wilayah. Secara nominal komponen Ekspor Barang dan Jasa pada lima tahun terakhir mengalami penambahan sebesar 272.370 miliar rupiah, nilai ekspor pada tahun 2013 masih pada posisi 440.293 miliar rupiah dan pada akhir tahun 2017 telah mencapai 712.663 miliar rupiah.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	440.292,66	504.250,14	560.913,96	610.723,54	712.663,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	379.154,22	400.530,84	423.152,22	435.563,51	485.841,24
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ^[1]	38,2	34,97	36,39	36,71	36,88
Pertumbuhan					
Total ekspor ^[2]	-6,29	5,64	5,65	2,93	11,54

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap total perekonomian Jawa Barat selama 2013-2017 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,63 persen.

Tercatat kontribusi terbesar komponen ekspor sebesar 38,20 persen terjadi pada tahun 2013 seiring dengan membaiknya perekonomian global sehingga permintaan barang dan jasa mengalami peningkatan. Sementara kontribusi terkecil komponen ini terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 34,97 persen kemudian pada tiga tahun berikutnya (2014-2016) kontribusi ekspor terhadap perekonomian relatif stabil pada posisi di atas 36 persen.

Kinerja ekspor barang dan jasa Jawa Barat secara tahunan pada periode (2013-2017) memiliki kecenderungan yang meningkat meskipun pada tahun 2013 berkontraksi sebesar 6,29 persen. Penurunan kinerja ekspor Jawa Barat pada tahun 2013 ini sebagai imbas dari kondisi perekonomian dunia yang belum membaik, terutama negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Barat seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dengan pengurangan permintaan ekspor.

Perkembangan ekspor barang dan jasa ada tahun 2014-2015 secara signifikan mengalami peningkatan di atas 5 (lima) persen kemudian pada tahun 2016 pertumbuhan ekspor melambat sebesar 2,93 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan peningkatan signifikan sebesar 11,54 persen. Pada tahun 2017 kinerja ekspor menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun demikian dari sisi proporsinya terhadap perekonomian Jawa Barat pada periode yang sama belum beranjak dari posisi 36 persen masih relative sama dengan level tahun sebelumnya.

Komoditas ekspor non migas utama Jawa Barat pada tahun 2017 berdasarkan peranannya terhadap ekspor total adalah sebagai berikut : 1) Kendaraan dan Bagiannya (15,40 persen); 2) Mesin/Peralatan Listrik (14,08 persen); 3) Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (10,70 persen); 4) Barang-barang Rajutan (7,47 persen); 5) Pakaian Jadi Bukan Rajutan (5,24 persen); 6) Alas Kaki (4,98 persen) dan 7) Karet dan Barang dari Karet (4,60 persen). Kinerja

komoditas ekspor Jawa Barat sejalan dengan impornya karena sebagian besar bahan baku untuk aktivitas produksi pada industri dengan orientasi ekspor berasal dari impor. Pada tahun 2017 peranan impor bahan baku mencapai 81,20 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Nilai komponen impor adh Berlaku pada periode empat tahun terakhir (2013-2017) memiliki kecenderungan yang meningkat, kecuali pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013 nilai impor adh Berlaku mencapai 436.058 miliar rupiah kemudian pada tahun 2017 mencapai 738.351 miliar rupiah atau selama periode lima tahun terakhir mengalami penambahan nilai sebesar 302.294 miliar rupiah. Sementara itu nilai komponen impor adh Konstan 2010 selama periode 2013-2016 terjadi penambahan nilai sebesar 65.394 miliar rupiah. Secara riil nilai impor pada tahun 2013 sebesar 368.279 miliar rupiah dan pada tahun 2017 mencapai 433.674 miliar rupiah.

Peranan komponen Impor Barang dan Jasa terhadap perekonomian Jawa Barat memiliki tendensi yang terus meningkat selama periode 2013-2017 dengan peranan terbesar pada tahun 2017 sebesar 39,90 persen. Porsi impor yang cukup besar dalam perekonomian Jawa Barat yaitu hampir mencapai 40 persen menunjukkan pengurangan terhadap perekonomian secara total. Komposisi impor yang cukup besar dalam suatu wilayah berarti secara ekonomi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap komoditas dari luar provinsi dan luar negeri. Pada sisi lain karakteristik impor Jawa Barat mayoritas merupakan impor bahan baku yaitu sebesar 81,20 persen pada tahun 2017 dimana hasil produksi kembali diekspor untuk menghasilkan devisa bagi perekonomian Jawa Barat.

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	436.057,69	500.554,09	569.302,83	637.501,02	738.351,25
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	368.279,95	381.830,50	390.857,05	395.797,41	433.673,79
Proporsi terhadap PDRB	34,97	36,39	36,78	36,95	39,90
(% - ADHB)					
<u>Pertumbuhan</u>					
Total impor	-17,47	3,68	2,36	1,26	9,57

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Kinerja komponen Impor Barang dan Jasa selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan pertumbuhan positif hingga akhir periode. Pada awal periode yaitu tahun 2013 mengalami

penurunan signifikan sebesar 17,47 persen sejalan dengan penurunan ekspor pada periode yang sama. Kemudian periode selanjutnya mengalami pertumbuhan positif meski mengarah pada perlambatan pertumbuhan setiap tahunnya hal ini berlangsung selama sampai tahun 2015. Kemudian, menginjak tahun 2017 komponen impor barang dan jasa meningkat signifikan sebesar 9,57 persen pola ini sejalan dengan pergerakan ekspor yang meningkat sebesar 11,54 persen.

Momentum pertumbuhan komponen Impor Barang dan Jasa di Jawa Barat yang cukup signifikan pada tahun 2017 diiringi dengan peningkatan peranannya secara signifikan terhadap perekonomian. Hal ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tepat dimana pertumbuhan impor yang tinggi menggambarkan ketergantungan yang besar bagi produk luar wilayah Jawa Barat sehingga peranannya secara bertahap harus dikurangi agar tidak menjadi pengurang perekonomian wilayah.

Selain itu jika diamati selama 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) terlihat bahwa nilai komponen impor secara nominal dan riil memiliki kesenjangan yang signifikan. Perbandingan antara nilai nominal dan riil pada tahun 2017 telah mencapai 4,5 kali lipat dari keadaan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa factor harga komoditas Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pemerintah harus mengambil kebijakan strategis untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap aktivitas impor karena impor berperan sebagai pengurang bagi kinerja perekonomian wilayah.

Apabila ditinjau dari klasifikasi impor menurut *Broad Economic Categories* (BEC) yaitu menunjukkan kategori akhir penggunaan barang. Tercatat klasifikasi impor luar negeri disertai dengan besaran proporsi pada tahun 2017 yaitu (1) impor bahan baku sebesar 81,20 persen (2) impor barang

modal sebesar 12,50 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 6,29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor luar negeri Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sehingga ketika *demand* terhadap ekspor barang meningkat maka akan memicu peningkatan aktivitas impornya untuk memenuhi bahan baku atau barang modal.

Analisa secara periodik neraca perdagangan Jawa Barat selama lima tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan bahwa surplus perdagangan hanya terjadi pada tahun 2013-2014, artinya nilai ekspor melebihi impor, sehingga menjadi devisa untuk membiayai pembangunan Jawa Barat dari hasil ekspor. Periode selanjutnya 2015-2017 perdagangan Jawa Barat mengalami defisit artinya ekspor Jawa Barat tidak cukup untuk membiayai aktivitas impor yang dilakukan.

Komoditas andalan impor luar negeri berdasarkan peranannya terhadap total impor luar negeri Jawa Barat adalah 1) Mesin / Peralatan Listik (24,66 persen); 2) Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (12,27 persen); 3) Plastik dan Barang dari Plastik (5,78 persen); 4) Kain Rajutan (5,68 persen); 5) Kendaraan dan Bagiannya (4,63 persen); 6) Filamen Buatan (4,36 persen) dan 7) Kapas (3,77 persen). Jenis komoditas berupa mesin dan kendaraan digolongkan kedalam barang modal dengan karakteristik dapat digunakan secara berulang dalam proses produksi, dengan fungsi menunjang aktivitas produksi Jawa Barat. Menurut informasi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jabar kebijakan pemerintah memperketat masuknya produk impor dalam bentuk benang dan produk jadi berdampak bagi industri dalam negeri. Industri, sehingga berdampak terhadap permintaan industri dalam negeri. Kebijakan pemerintah sudah seharusnya memberikan keberpihakan terhadap industri dalam negeri sehingga tidak serta merta mengandalkan impor yang hanya menguntungkan sebagian kecil pihak.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013 - 2017

<https://jabar.bps.go.id>

PDRB secara agregat menggambarkan keberhasilan pembangunan wilayah dalam bidang ekonomi, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu juga menggambarkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk secara makro. Analisis perkembangan agregat PDRB digunakan dalam analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB Pengeluaran merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian nilai PDRB ini, dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik.

Dari series data PDRB Pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan satu wilayah dapat didekati dengan nilai dari data PDRB per kapita.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	1.258.989,33	1.385.825,08	1.524.974,83	1.652.757,82	1.786.092,38
- ADHK 2010	1.093.543,55	1.149.216,06	1.207.232,34	1.275.527,64	1.342.953,38
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	27.767,25	30.107,26	32.648,00	34.883,47	37.181,13
- ADHK 2010	24.118,31	24.966,89	25.845,49	26.921,57	27.956,30
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,70	3,52	3,52	4,16	3,84
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	45.340,80	46.029,60	46.709,60	47.379,40	48.037,60
Pertumbuhan	1,56	1,52	1,48	1,43	1,39

Seiring dengan peningkatan nilai total PDRB Provinsi Jawa Barat, maka PDRB per-kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), meskipun dari sisi jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Jawa Barat secara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per-kapita Provinsi Jawa Barat di tahun 2013 mencapai Rp. 27,767.25 ribu rupiah dan di tahun 2017 meningkat hingga mencapai Rp 37,181.13 ribu rupiah. Peningkatan per-kapita pada kisaran 4 persen dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Adapun pertumbuhan jumlah penduduk mengalami perlambatan dari 1,56% di tahun 2013 menjadi 1,39% di tahun 2017. Dengan demikian maka pertumbuhan PDRB per-kapita tersebut mengalami perlambatan baik secara “riil” maupun secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri dari konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian juga perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Memberi gambaran dari produk yang dihasilkan di wilayah tersebut berapa besar untuk konsumsi dan berapa besar digunakan untuk ekspor.

Kontribusi konsumsi rumah tangga PDRB Jawa Barat sangat dominan yaitu sekitar 65 persen, artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga, termasuk di dalamnya produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	812.568,32	881.109,40	983.765,23	1.083.451,79	1.174.540,81
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	440.292,66	504.250,14	560.913,96	610.723,54	712.663,11
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,85	1,75	1,75	1,77	1,65

Tabel 18 menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor selama periode 2013-2017 selalu sejalan yaitu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 konsumsi akhir rumah tangga mencapai

Rp.812,57 triliun pada akhir periode kelima telah mencapai hingga Rp. 1.174,54 triliun, demikian pula untuk total ekspor Jawa Barat pada tahun 2013 masih pada level Rp. 440,29 triliun dan pada akhir tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 712,66 triliun.

Selama kurun waktu 2013-2017 perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dengan ekspor diperoleh bahwa rata-ratanya mencapai 1,75. Hal ini memberi gambaran bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di wilayah Provinsi Jawa Barat hampir mencapai dua kali lipat dari produk yang digunakan untuk ekspor. Perkembangan rasio nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor selama lima tahun terakhir (2013-2017) terlihat bahwa pada tahun 2013 memiliki nilai tertinggi dibanding periode setelahnya. Penurunan nilai perbandingan ini memberikan gambaran bahwa tingkat kenaikan konsumsi rumah tangga tidak sebesar kenaikan pada komponen ekspor, hal ini masih memberikan harapan bagi Provinsi Jawa Barat untuk bisa meningkatkan nilai ekpornya baik dalam negeri maupun luar negeri.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB (investasi). Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca, tambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Dari tabel 19 terlihat bahwa mayoritas penggunaan produk yang tersedia di wilayah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk konsumsi akhir

rumah tangga, adapun untuk barang modal hanya sepertiga bagian dari penggunaan konsumsi rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	812.568,32	881.109,40	983.765,23	1.083.451,79	1.174.540,81
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	301.400,00	346.009,58	382.975,60	412.295,91	449.337,05
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,70	2,55	2,57	2,63	2,61

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan tendensi yang menurun dengan rata-rata rasio sebesar 2,61 rasio ini menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga mencapai lebih dari 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan penggunaan untuk investasi. Hal ini memberi gambaran bahwa tingkat investasi yang berasal dari produk wilayah sendiri masih jauh dibandingkan dengan pemenuhan untuk kebutuhan rumah tangga.

Perkembangan nilai rasio konsumsi rumah tangga terhadap investasi pada tahun 2013 sebesar 2,70 kemudian menurun tipis pada tahun berikutnya 2,55 dan ditutup pada tahun 2017 sebesar 2,61 kecenderungan penurunan rasio ini merupakan hal yang harus dicermati karena karakteristik pengeluaran di Jawa Barat menjadi kurang produktif.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pelaku konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga. Pengeluaran rumah tangga untuk tempat tinggal pembentukan modal tetap bruto.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	812.568,32	881.109,40	983.765,23	1.083.451,79	1.174.540,81
b. LNPRT	8.518,79	9.189,59	8.908,65	9.564,96	10.545,72
c. Pemerintah	73.717,54	81.202,69	98.292,76	105.727,59	108.388,22
Jumlah	894.804,66	971.501,68	1.090.966,64	1.198.744,34	1.293.474,75
PDRB (ADHB) (Milyar Rp)	1.258.989,33	1.385.825,08	1.524.974,83	1.652.757,82	1.786.092,38
Proporsi (%)	71,07	70,10	71,54	72,53	72,42

Tabel 20, menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai rata-rata 71,53 persen yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, demikian juga proporsinya terhadap PDRB

cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan masih kuatnya komponen konsumsi dalam mendrive perekonomian Jawa Barat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumsi dapat sangat berpengaruh bagi perekonomian secara agregat. Misalnya kebijakan dalam menaikkan harga bahan bakar minyak, dapat menekan konsumsi masyarakat terutama daya beli.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/ pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antar residen dengan non residen yang berada diluar wilayah tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri. Perbandingan ekspor terhadap PMTB memberikan gambaran mengenai seberapa besar produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah digunakan untuk aktivitas ekspor dan investasi.

Apabila rasio ekspor lebih tinggi dari PMTB memberi gambaran bahwa produk yang dihasilkan banyak digunakan untuk kegiatan ekspor dibandingkan digunakan untuk investasi demikian sebaliknya jika rasionya lebih kecil dari 1 (satu) maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah banyak digunakan untuk investasi dibandingkan untuk ekspor.

Seluruh produk domestik yang dihasilkan menuntut tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB dari tahun 2013-2017 mempunyai nilai rata-rata 1,49 (Tabel 21) memiliki makna bahwa produk yang digunakan untuk ekspor lebih besar daripada untuk investasi fisik. Secara periodik selama lima tahun terakhir (2013-2017) rasio ini stabil pada tiga tahun pertama kemudian secara bertahap meningkat pada tahun keempat dan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017.

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	440.292,66	504.250,14	560.913,96	610.723,54	712.663,11
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	301.400,00	346.009,58	382.975,60	412.295,91	449.337,05
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,46	1,46	1,46	1,48	1,59

Selama lima tahun terakhir perekonomian Jawa Barat menunjukkan kecenderungan meningkatnya peranan aktivitas ekspor dibandingkan dengan investasi. Kinerja ekspor yang membaik di satu sisi merupakan hal positif bagi perekonomian Jawa Barat, meskipun demikian porsi investasi pun sangat krusial dalam meningkatkan daya saing produk dalam aktivitas ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, dimana hal ini memberi gambaran tingkat ketergantungan terhadap produk impor semakin meningkat. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir rasio produk domestic terhadap aktivitas impor di Jawa Barat sebesar 2,67, dimana pada tahun 2013 rasio masih pada posisi 2,89 persen kemudian berturut-turut mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga posisi di tahun 2017 yaitu 2,42.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.258.989,33	1.385.825,08	1.524.974,83	1.652.757,82	1.786.092,38
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	436.057,69	500.554,09	569.302,83	637.501,02	738.351,25
Rasio PDRB terhadap Impor	2,89	2,77	2,68	2,59	2,42

Penurunan rasio ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan wilayah terhadap produk impor dimana jika rasio menurun menunjukkan ketergantungan impor semakin tinggi sebaliknya jika rasio meningkat maka ketergantungan terhadap impor menurun. Apabila diamati dari tendensi rasio produk domestik terhadap impor yang semakin menurun, maka lambat laun akan berdampak terhadap aktivitas produksi domestik sehingga pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang mendukung sektor produktif untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Total penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam ekonomi yang berasal dari produksi domestik atau impor sehingga total penyediaan ini merupakan penjumlahan dari output dengan impor. Adapun keseimbangan antara total penyediaan dengan permintaan adalah keseimbangan antara total output dan Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp)%	1,258,989.33 74.27	1,385,825.08 73.46	1,524,974.83 72.82	1,652,757.82 72.16	1,786,092.38 70.75
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)%	436,057.69 25.73	500,554.09 26.54	569,302.83 27.18	637,501.02 27.84	738,351.25 29.25
Total Permintaan Akhir ⁶ (Miliar Rp)%	1,695,047.01 100,00	1,886,379.16 100,00	2,094,277.66 100,00	2,290,258.84 100,00	2,524,443.63 100,00

Dari tabel tersebut diatas, dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp. 1,695,047.01 miliar (2013) menjadi sebesar Rp. 2,524,443.63 miliar (2016). Untuk memenuhi jumlah permintaan sebagian produk masih harus didatangkan dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat baik dari luar negeri maupun dari Provinsi lain. Nilai impor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 436,057.69 milyar di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 738,351.25 milyar. Hal ini dapat diamati pula dari rasio impor per tahun yang terus meningkat dengan rasio tertinggi di tahun 2017 sebesar 29,25 persen dan terendah di tahun 2013 sebesar 25,73 persen. Kondisi ini berlawanan dengan pemenuhan permintaan yang berasal dari produk domestik, dimana ada kecenderungan akan terus menurun. Sampai tahun 2017 Provinsi Jawa Barat baru bisa memenuhi sekitar 70,75 persen dan sisanya dari produk impor sebesar 29,25% baik impor luar negeri maupun dalam negeri. Dengan kondisi demikian Provinsi Jawa Barat harus melakukan inovasi-inovasi baru sehingga akan meningkatkan pemenuhan permintaan akhir yang berasal dari produk domestik.

⁶ Termasuk diskrepansi statistik

Di sisi lain secara rinci tiap tahun “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik Jawa Barat dari tahun 2013-2017 dan nilai impor dapat diamati pada Tabel 23.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Neraca perdagangan (*balance of trade*) adalah sebuah nilai yang mencirikan hubungan perdagangan internasional suatu negara. Komponen neraca perdagangan ialah ekspor dan impor negara tersebut. Perbedaan antara nilai kedua komponen tersebut memperlihatkan daya saing suatu negara di bidang perdagangan. Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit.

Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut. Untuk wilayah regional neraca perdagangan ini menggambarkan perdagangan barang dan jasa baik untuk perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar wilayah (provinsi).

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih

tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	440,292.66	504,250.14	560,913.96	610,723.54	712,663.11
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	436,057.69	500,554.09	569,302.83	637,501.02	738,351.25
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	4,234.97	3,696.05	(8,388.87)	(26,777.48)	(25,688.14)
Rasio ekspor thdp Impor	1.01	1.01	0.99	0.96	0.97

Neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan antar provinsi Tahun 2013-2014 menunjukkan angka positif atau rasio ekspor terhadap impor diatas satu. Hal ini memberi gambaran bahwa di tahun tersebut neraca perdagangan dalam posisi surplus. Sedangkan untuk tahun 2015-2017 menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Barat menunjukkan angka negatif atau rasio ekspor terhadap impor dibawah satu. Hal ini memberi gambaran bahwa neraca perdagangan dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa yang masuk sebaliknya jika posisi defisit maka aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai **“utang luar negeri”**. Defisit perdagangan Provinsi Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan 2017 tercatat masing-masing sebesar Rp. 8,388.87 miliar (2015), Rp. 26,777,48 miliar (2016) dan Rp. 25,688.48 miliar (2017). Di tahun 2013 dan 2014 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami surplus dimana nilai ekspor lebih besar daripada impor yaitu Rp. 4.234,97 miliar dan Rp. 3,696.05 miliar.

Rasio ekspor terhadap impor dari tahun 2015-2017 cenderung stabil sekitar 0.97 dan tahun 2013-2014 rasio ekspor terhadap impor sama yaitu 1.01.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Perkembangan ekspor dan impor luar negeri terlihat di Tabel 25 yang memberi gambaran bahwa pada periode di tahun 2013-2017 posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari pada impor luar negeri dengan kecenderungan nilai ekspor luar negeri yang terus meningkat yaitu nilai ekspor luar negeri dari Rp. 279,660.31 milyar di tahun 2013 menjadi Rp. 395,218.65 Milyar di tahun 2017. Hal yang sama dengan impor luar negeri ada kecenderungan terus meningkat yaitu dari nilai impor sebesar Rp. 165,900.80 milyar di tahun 2013 menjadi Rp. 196,720.19 milyar di tahun 2017.

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Provinsi Jawa Barat pada periode 2013-2017 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio masih cukup kecil yaitu rata-rata 0,29 dengan RPI tertinggi di tahun 2017 yang sebesar 0.34.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional,
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	279,660.31	329,350.77	348,639.10	347,936.13	395,218.65
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	165,900.80	185,811.81	194,526.91	195,948.53	196,720.19
(X - M) (Miliar Rp)	113,759.50	143,538.96	154,112.20	151,987.60	198,498.46
(X +M) (Miliar Rp)	445,561.11	515,162.59	543,166.01	543,884.66	591,938.83
RPI	0.26	0.28	0.28	0.28	0.34

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Rasio ini juga menggambarkan efisiensi penggunaan modal yang ditambahkan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Besaran nilai ICOR yang efisien berkisar antara 3% sampai dengan 4 % dengan arti bahwa nilai ICOR yang semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi.

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang

dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Melihat pergerakan nilai ICOR dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terlihat bahwa dari tahun ke tahun produktifitas kapital yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi semakin tidak efisien, terlihat dari semakin besarnya nilai ICOR yaitu dari sebesar 4,12 di tahun 2013 menjadi 4,94 di tahun 2017. Terlebih lagi di tahun 2014 dan 2015 ICOR meningkat hingga mencapai diatas 5 yaitu 5,16 di tahun 2014 dan 5,16 di tahun 2015 (Tabel 26).

ICOR juga menjadi salah satu indikasi tingkat efisiensi perekonomian suatu negara karena semakin kecil ICOR berarti suatu investasi mampu menghasilkan *output* yang semakin besar.

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio,
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	1,093,543.55	1,149,216.06	1,207,232.34	1,275,527.64	1,342,953.38
$\Delta(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})$ (Miliar rupiah)	65,133.81	55,672.51	58,016.28	68,295.30	67,425.73
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rupiah)	268,318.28	287,389.55	299,342.64	313,083.70	332,750.61
ICOR	4.12	5.16	5.16	4.58	4.94

Nilai investasi yang direfleksikan dari nilai PMTB, kontribusi investasi di dalam struktur PDRB Jawa Barat pada 2017 sebesar Rp 449,34 triliun, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Jumlah investasi itu menyumbang pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 25,16%. Adapun, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tercatat sebesar 5,29%.

BAB V
PENUTUP

<https://jabar.bps.go.id>

1. PDRB merupakan ukuran kinerja untuk perekonomian di tingkat regional (provinsi) dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama yaitu SNNI 2010, dengan harapan hasil penghitungan PDRB akan konsisten.
2. PDRB menurut penggunaan tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
3. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
4. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 sampai dengan 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan

karakteristik masing-masing data.

5. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
6. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN

<https://jabar.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

(Juta Rupiah)

ATAS DASAR HARGA BERLAKU	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	812.568.324	881.109.399	983.765.227	1.083.451.790	1.174.540.809
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	305.836.322	343.286.038	387.560.659	447.837.054	488.646.180
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	35.022.297	36.211.694	39.799.949	43.017.436	45.920.359
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	99.472.712	104.461.806	119.142.681	127.205.481	137.804.914
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	48.945.531	52.461.770	56.828.471	60.521.611	65.822.015
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	222.219.757	236.309.593	263.588.897	282.842.229	304.920.745
1.f. Hotel dan Restoran	54.290.767	57.176.596	60.714.544	63.734.645	68.626.597
1.g. Lainnya	46.780.937	51.201.901	56.130.026	58.293.335	62.799.998
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.518.791	9.189.586	8.908.646	9.564.960	10.545.720
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	73.717.545	81.202.692	98.292.765	105.727.585	108.388.220
3.a. Konsumsi Kolektif	41.628.105	46.353.994	54.735.871	57.519.431	56.690.797
3.b. Konsumsi Individu	32.089.440	34.848.698	43.556.894	48.208.154	51.697.423
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	301.400.004	346.009.578	382.975.600	412.295.911	449.337.047
4.a. Bangunan	233.363.313	260.271.404	288.867.755	307.656.211	338.490.534
4.b. Non-Bangunan	68.036.691	85.738.174	94.107.845	104.639.700	110.846.513
5. Perubahan Inventori	58.549.693	64.617.770	59.421.458	68.495.050	68.968.719
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	279.660.307	329.350.772	348.639.105	347.936.128	395.218.647
6.a. Barang	274.569.654	323.592.776	343.300.637	341.951.338	388.628.071
6.b. Jasa	5.090.653	5.757.996	5.338.468	5.984.790	6.590.576
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	165.900.804	185.811.813	194.526.908	195.948.530	196.720.186
7.a. Barang	148.849.890	164.006.475	170.827.150	171.161.372	169.816.196
7.b. Jasa	17.050.914	21.805.338	23.699.758	24.787.158	26.903.990
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(109.524.532)	(139.842.906)	(162.501.066)	(178.765.075)	(224.186.599)
8.a. Ekspor	160.632.350	174.899.366	212.274.860	262.787.411	317.444.466
8.b. Impor	270.156.882	314.742.273	374.775.926	441.552.487	541.631.065
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.258.989.329	1.385.825.076	1.524.974.827	1.652.757.819	1.786.092.377

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

(Juta Rupiah)

ATAS DASAR HARGA KONSTAN	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	695.522.782	723.018.268	759.652.857	802.157.907	839.292.730
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	238.789.659	251.873.389	269.066.091	287.673.919	304.615.680
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	33.051.233	33.923.862	36.497.936	38.322.569	39.748.686
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	87.185.409	88.786.750	93.813.227	98.754.818	100.571.536
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	45.270.808	47.522.578	48.947.612	50.548.672	53.013.109
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	198.928.774	205.449.428	213.946.187	226.551.935	236.409.683
1.f. Hotel dan Restoran	51.082.000	50.947.886	52.051.847	54.628.493	57.448.666
1.g. Lainnya	41.214.900	44.514.374	45.329.956	45.677.500	47.485.370
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.466.064	7.726.701	7.098.776	7.487.436	7.844.282
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	58.868.332	61.013.469	65.955.833	68.434.125	68.593.578
3.a. Konsumsi Kolektif	33.350.456	34.311.692	36.475.956	37.012.670	35.600.766
3.b. Konsumsi Individu	25.517.876	26.701.777	29.479.876	31.421.455	32.992.812
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	268.318.281	287.389.550	299.342.638	313.083.696	332.750.607
4.a. Bangunan	206.790.122	215.055.740	226.085.803	237.445.269	254.636.416
4.b. Non-Bangunan	61.528.159	72.333.810	73.256.835	75.638.427	78.114.191
5. Perubahan Inventori	52.493.816	51.367.730	42.887.061	44.598.377	42.304.730
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	245.716.075	269.833.687	272.010.778	261.402.958	277.483.597
6.a. Barang	241.498.715	265.561.309	268.344.713	257.653.066	273.470.578
6.b. Jasa	4.217.360	4.272.378	3.666.064	3.749.892	4.013.019
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	139.505.920	149.533.866	145.837.894	153.430.925	149.493.430
7.a. Barang	125.928.421	134.214.243	130.500.824	138.646.082	133.873.035
7.b. Jasa	13.577.499	15.319.622	15.337.070	14.784.844	15.620.395
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(95.335.885)	101.599.482)	(93.877.707)	(68.205.930)	(75.822.719)
8.a. Ekspor	133.438.150	130.697.150	151.141.445	174.160.555	208.357.642
8.b. Impor	228.774.035	232.296.631	245.019.152	242.366.485	284.180.361
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.093.543.546	1.149.216.057	1.207.232.342	1.275.527.644	1.342.953.376

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

ATAS DASAR HARGA BERLAKU	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	64,54	63,58	64,51	65,55	65,76
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,29	24,77	25,41	27,10	27,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,78	2,61	2,61	2,60	2,57
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,90	7,54	7,81	7,70	7,72
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,89	3,79	3,73	3,66	3,69
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	17,65	17,05	17,28	17,11	17,07
1.f. Hotel dan Restoran	4,31	4,13	3,98	3,86	3,84
1.g. Lainnya	3,72	3,69	3,68	3,53	3,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	0,66	0,58	0,58	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	5,86	5,86	6,45	6,40	6,07
3.a. Konsumsi Kolektif	3,31	3,34	3,59	3,48	3,17
3.b. Konsumsi Individu	2,55	2,51	2,86	2,92	2,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	23,94	24,97	25,11	24,95	25,16
4.a. Bangunan	18,54	18,78	18,94	18,61	18,95
4.b. Non-Bangunan	5,40	6,19	6,17	6,33	6,21
5. Perubahan Inventori	4,65	4,66	3,90	4,14	3,86
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	22,21	23,77	22,86	21,05	22,13
6.a. Barang	21,81	23,35	22,51	20,69	21,76
6.b. Jasa	0,40	0,42	0,35	0,36	0,37
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	13,18	13,41	12,76	11,86	11,01
7.a. Barang	11,82	11,83	11,20	10,36	9,51
7.b. Jasa	1,35	1,57	1,55	1,50	1,51
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(8,70)	(10,09)	(10,66)	(10,82)	(12,55)
8.a. Ekspor	12,76	12,62	13,92	15,90	17,77
8.b. Impor	21,46	22,71	24,58	26,72	30,32
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

ATAS DASAR HARGA KONSTAN	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a.s/d 1.g.)	63,60	62,91	62,93	62,89	62,50
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	21,84	21,92	22,29	22,55	22,68
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,02	2,95	3,02	3,00	2,96
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,97	7,73	7,77	7,74	7,49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,14	4,14	4,05	3,96	3,95
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	18,19	17,88	17,72	17,76	17,60
1.f. Hotel dan Restoran	4,67	4,43	4,31	4,28	4,28
1.g. Lainnya	3,77	3,87	3,75	3,58	3,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	0,67	0,59	0,59	0,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	5,38	5,31	5,46	5,37	5,11
3.a. Konsumsi Kolektif	3,05	2,99	3,02	2,90	2,65
3.b. Konsumsi Individu	2,33	2,32	2,44	2,46	2,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	24,54	25,01	24,80	24,55	24,78
4.a. Bangunan	18,91	18,71	18,73	18,62	18,96
4.b. Non-Bangunan	5,63	6,29	6,07	5,93	5,82
5. Perubahan Inventori	4,80	4,47	3,55	3,50	3,15
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	22,47	23,48	22,53	20,49	20,66
6.a. Barang	22,08	23,11	22,23	20,20	20,36
6.b. Jasa	0,39	0,37	0,30	0,29	0,30
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	12,76	13,01	12,08	12,03	11,13
7.a. Barang	11,52	11,68	10,81	10,87	9,97
7.b. Jasa	1,24	1,33	1,27	1,16	1,16
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(8,72)	(8,84)	(7,78)	(5,35)	(5,65)
8.a. Ekspor	12,20	11,37	12,52	13,65	15,51
8.b. Impor	20,92	20,21	20,30	19,00	21,16
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

ATAS DASAR HARGA BERLAKU	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,66	8,44	11,65	10,13	8,41
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	13,58	12,25	12,90	15,55	9,11
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	9,74	3,40	9,91	8,08	6,75
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,75	5,02	14,05	6,77	8,33
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	10,13	7,18	8,32	6,50	8,76
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	8,61	6,34	11,54	7,30	7,81
1.f. Hotel dan Restoran	6,33	5,32	6,19	4,97	7,68
1.g. Lainnya	6,40	9,45	9,62	3,85	7,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	24,19	7,87	(3,06)	7,37	10,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	6,85	10,15	21,05	7,56	2,52
3.a. Konsumsi Kolektif	10,60	11,35	18,08	5,09	(1,44)
3.b. Konsumsi Individu	2,34	8,60	24,99	10,68	7,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	2,49	14,80	10,68	7,66	8,98
4.a. Bangunan	15,59	11,53	10,99	6,50	10,02
4.b. Non-Bangunan	(26,20)	26,02	9,76	11,19	5,93
5. Perubahan Inventori	(19,81)	10,36	(8,04)	15,27	0,69
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	6,75	17,77	5,86	(0,20)	13,59
6.a. Barang	6,59	17,85	6,09	(0,39)	13,65
6.b. Jasa	16,31	13,11	(7,29)	12,11	10,12
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	1,86	12,00	4,69	0,73	0,39
7.a. Barang	(0,00)	10,18	4,16	0,20	(0,79)
7.b. Jasa	21,58	27,88	8,69	4,59	8,54
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(26,03)	27,68	16,20	10,01	25,41
8.a. Ekspor	(4,99)	8,88	21,37	23,80	20,80
8.b. Impor	(14,81)	16,50	19,07	17,82	22,67
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	11,59	10,07	10,04	8,38	8,07

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

ATAS DASAR HARGA KONSTAN	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,37	3,95	5,07	5,60	4,63
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,32	5,48	6,83	6,92	5,89
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,95	2,64	7,59	5,00	3,72
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,77	1,84	5,66	5,27	1,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,23	4,97	3,00	3,27	4,88
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4,10	3,28	4,14	5,89	4,35
1.f. Hotel dan Restoran	3,37	(0,26)	2,17	4,95	5,16
1.g. Lainnya	2,71	8,01	1,83	0,77	3,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14,34	3,49	(8,13)	5,48	4,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	0,89	3,64	8,10	3,76	0,23
3.a. Konsumsi Kolektif	4,43	2,88	6,31	1,47	(3,81)
3.b. Konsumsi Individu	(3,39)	4,64	10,40	6,59	5,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	(1,02)	7,11	4,16	4,59	6,28
4.a. Bangunan	10,81	4,00	5,13	5,02	7,24
4.b. Non-Bangunan	(27,14)	17,56	1,28	3,25	3,27
5. Perubahan Inventori	(22,46)	(2,15)	(16,51)	3,99	(5,14)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	(3,36)	9,82	0,81	(3,90)	6,15
6.a. Barang	(3,50)	9,96	1,05	(3,98)	6,14
6.b. Jasa	4,78	1,30	(14,19)	2,29	7,02
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	(2,38)	7,19	(2,47)	5,21	(2,57)
7.a. Barang	(3,15)	6,58	(2,77)	6,24	(3,44)
7.b. Jasa	5,36	12,83	0,11	(3,60)	5,65
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(37,69)	6,57	(7,60)	(27,35)	11,17
8.a. Ekspor	(11,25)	(2,05)	15,64	15,23	19,64
8.b. Impor	(24,58)	1,54	5,48	(1,08)	17,25
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,33	5,09	5,05	5,66	5,29

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

ATAS DASAR HARGA BERLAKU	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	111	108	112	110	108
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	114	112	113	116	109
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	110	103	110	108	107
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	112	105	114	107	108
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	110	107	108	106	109
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	109	106	112	107	108
1.f. Hotel dan Restoran	106	105	106	105	108
1.g. Lainnya	106	109	110	104	108
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124	108	97	107	110
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	107	110	121	108	103
3.a. Konsumsi Kolektif	111	111	118	105	99
3.b. Konsumsi Individu	102	109	125	111	107
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	102	115	111	108	109
4.a. Bangunan	116	112	111	107	110
4.b. Non-Bangunan	74	126	110	111	106
5. Perubahan Inventori	80	110	92	115	101
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	107	118	106	100	114
6.a. Barang	107	118	106	100	114
6.b. Jasa	116	113	93	112	110
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	102	112	105	101	100
7.a. Barang	100	110	104	100	99
7.b. Jasa	122	128	109	105	109
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	74	128	116	110	125
8.a. Ekspor	95	109	121	124	121
8.b. Impor	85	117	119	118	123
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	112	110	110	108	108

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

ATAS DASAR HARGA KONSTAN	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	104	104	105	106	105
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	104	105	107	107	106
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	108	103	108	105	104
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	104	102	106	105	102
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	107	105	103	103	105
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	104	103	104	106	104
1.f. Hotel dan Restoran	103	100	102	105	105
1.g. Lainnya	103	108	102	101	104
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114	103	92	105	105
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	101	104	108	104	100
3.a. Konsumsi Kolektif	104	103	106	101	96
3.b. Konsumsi Individu	97	105	110	107	105
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	99	107	104	105	106
4.a. Bangunan	111	104	105	105	107
4.b. Non-Bangunan	73	118	101	103	103
5. Perubahan Inventori	78	98	83	104	95
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	97	110	101	96	106
6.a. Barang	97	110	101	96	106
6.b. Jasa	105	101	86	102	107
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	98	107	98	105	97
7.a. Barang	97	107	97	106	97
7.b. Jasa	105	113	100	96	106
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	62	107	92	73	111
8.a. Ekspor	89	98	116	115	120
8.b. Impor	75	102	105	99	117
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	106	105	105	106	105

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional (2010=100)
Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

PENGELUARAN (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017* (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	117	122	130	135	140
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	128	136	144	156	160
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	106	107	109	112	116
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	114	118	127	129	137
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	108	110	116	120	124
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	112	115	123	125	129
1.f. Hotel dan Restoran	106	112	117	117	119
1.g. Lainnya	114	115	124	128	132
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114	119	125	128	134
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	125	133	149	154	158
3.a. Konsumsi Kolektif	125	135	150	155	159
3.b. Konsumsi Individu	126	131	148	153	157
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	112	120	128	132	135
4.a. Bangunan	113	121	128	130	133
4.b. Non-Bangunan	111	119	128	138	142
5. Perubahan Inventori	112	126	139	154	163
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	114	122	128	133	142
6.a. Barang	114	122	128	133	142
6.b. Jasa	121	135	146	160	164
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	119	124	133	128	132
7.a. Barang	118	122	131	123	127
7.b. Jasa	126	142	155	168	172
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	115	138	173	262	296
8.a. Ekspor	120	134	140	151	152
8.b. Impor	118	135	153	182	191
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	117	122	130	135	140

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

PENGELUARAN (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017* (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,03	4,31	6,27	4,30	3,61
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,87	6,41	5,68	8,08	3,04
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,66	0,74	2,16	2,94	2,92
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,69	3,12	7,94	1,42	6,38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,71	2,11	5,17	3,13	3,70
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4,34	2,97	7,11	1,33	3,31
1.f. Hotel dan Restoran	2,87	5,59	3,94	0,02	2,39
1.g. Lainnya	3,59	1,34	7,65	3,06	3,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,61	4,24	5,52	1,79	5,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	5,90	6,28	11,98	3,67	2,28
3.a. Konsumsi Kolektif	5,90	8,23	11,08	3,56	2,47
3.b. Konsumsi Individu	5,93	3,78	13,21	3,84	2,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	3,54	7,18	6,26	2,93	2,54
4.a. Bangunan	4,32	7,24	5,57	1,41	2,59
4.b. Non-Bangunan	1,29	7,19	8,38	7,69	2,57
5. Perubahan Inventori	3,41	12,78	10,14	10,85	6,15
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	10,47	7,24	5,01	3,85	7,01
6.a. Barang	10,45	7,18	4,99	3,74	7,08
6.b. Jasa	11,00	11,65	8,05	9,60	2,90
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	4,34	4,49	7,34	(4,25)	3,04
7.a. Barang	3,25	3,38	7,12	(5,69)	2,75
7.b. Jasa	15,39	13,34	8,56	8,49	2,73
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	18,71	19,81	25,76	51,41	12,81
8.a. Ekspor	7,06	11,17	4,95	7,43	0,97
8.b. Impor	12,96	14,74	12,89	19,11	4,62
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	4,94	4,74	4,75	2,58	2,64

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
- _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
- _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
- _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
- United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
- _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
- _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
- _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

<https://jabar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat

Telp. (022) 7272595; (022) 7201696; Faks.: (022) 7213572

E-Mail : bps3200@bps.go.id

Website : <http://jabar.bps.go.id>